

Komunikasi Inklusif bagi Kader Posyandu dalam Menjalankan Perannya sebagai Penggerak dan Penyuluh Masyarakat

Sinta Swastikawara¹, Yun Fitrahyati Laturrakmi²

^{1,2}Universitas Brawijaya, Malang

sintaswastika@ub.ac.id

| 67

ABSTRAK

Pemahaman atas *disability awareness* saat ini tidak hanya menjadi fokus perhatian para pemerhati isu disabilitas saja, namun juga menjadi salah satu konsentrasi bagi masyarakat salah satunya kader posyandu. Merujuk pada Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016, pemenuhan hak penyandang disabilitas terkait aksesibilitas informasi kesehatan di tingkat Posyandu juga harus menjadi salah satu kebutuhan dari masyarakat penyandang disabilitas. Oleh karena itu, komunikasi inklusif sebagai perwujudan dari aksesibilitas informasi menjadi salah satu perhatian bagi kader Posyandu. Berdasarkan data di lapangan, ditemukan bahwa kader posyandu masih banyak menggunakan istilah “cacat” dibandingkan “disabilitas” atau “difabel” dalam penyebutan kondisi disabilitas. Bahkan kader posyandu masih belum memahmai perbedaan serta makna negatif yang terkandung dalam penggunaan istilah “cacat” tersebut. Selanjutnya, dari hasil pemberian literasi terkait *disability awareness*, kader posyandu memahami perbedaan antara istilah “cacat” dan “disabilitas”. Selain itu, dalam aktivitas *role play* yang dilakukan oleh kader posyandu dengan menerapkan komunikasi inklusif yang paling dasar yaitu etika komunikasi kepada penyandang disabilitas diharapkan dapat menjadi bekal dasar ketika kader posyandu memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman atas *disability awareness* dan penerapan komunikasi inklusif pada kader posyandu dapat menjadi bekal dasar bagi mereka untuk memberikan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Kata kunci : Komunikasi inklusif, *disability awareness*, kader posyandu

ABSTRACT

The understanding of disability awareness is not only the focus of disability advocates but also one of the priorities for the community, including Posyandu Cadres. Referring to Law number 8 of 2016, fulfilling the rights people with disabilities related to accessibility to health information at the Posyandu level should also be one of the needs of the disability community. Therefore, inclusive communication as a manifestation of information accessibility is a concern for Posyandu Cadres. Based on field data, it was found that Posyandu Cadres still often use the term “impairment/defective” rather than “disability” or “difable” when referring to disability conditions. In fact, Posyandu Cadres still do not fully understand the differences and the negative connotations associated with the use of the term “impairment/defective”. Furthermore, from the result of literacy related to disability awareness, Posyandu Cadres now understand the difference between the terms “impairment/defective” and “disability”. In addition, through role-playing activities where Posyandu Cadres practice basic inclusive communication etiquette with people with disabilities, it is hoped that they can have a foundational understanding when providing services to people with disabilities. In conclusion, understanding disability awareness and implementing inclusive communication among Posyandu Cadres can serve as a foundation for them to provide friendly services to people with disabilities.

Keywords: *Inclusive communication, disability awareness, Posyandu Cadres*

Pendahuluan

Pemberian pelayanan bagi masyarakat secara adil menjadi salah satu pegangan bagi kader Posyandu dalam memberikan pelayanan. Dengan kondisi masyarakat yang sangat beragam termasuk di dalamnya adalah masyarakat penyandang disabilitas, maka menjadi penting bagi kader Posyandu untuk memahami kondisi tersebut sebagai bekal utama menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat (Iswahyudi & Firdaus, 2010). Oleh sebab itu, dibutuhkan bekal pemahaman komunikasi yang inklusif sehingga dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang menggunakan layanan Posyandu menjadi nyaman.

Kondisi yang ada saat ini, para kader Posyandu yang umumnya berasal dari ibu-ibu yang ada di wilayah atau lingkup RW tidak selalu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara inklusif kepada masyarakat penyandang disabilitas. Pada kelompok Posyandu Dahlia yang ada di RW 03, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang yang beranggotakan 12 kader Posyandu umumnya kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Walaupun sejauh ini penyandang disabilitas yang mereka hadapi secara langsung adalah penyandang disabilitas fisik yang umumnya terkait dengan mobilitas, misalnya pengguna kursi roda, namun terkadang mereka juga mengalami kebingungan terkait cara menyampaikan informasi yang tepat agar tidak menyinggung perasaan penyandang disabilitas. Selama ini, kader Posyandu umumnya berusaha mendekati dan mengkomunikasikan pesan dengan cara memperhalus kalimat atau bahkan menggunakan perantara pendamping penyandang disabilitas ketika ingin menginformasikan sesuatu.

Selain itu, dari data yang ditemukan di lapangan, menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang disabilitas juga masih cukup rendah. Ketika dihadapkan pada penyandang disabilitas fisik pengguna kursi roda, mereka berpandangan bahwa orang tersebut pasti membutuhkan bantuan dan cenderung memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok yang perlu dikasihani (M. B. Santoso & Apsari, 2017). Hal ini jelas bertolak belakang dengan cara pandang *social model* dalam memandang disabilitas. Dalam kacamata *social model* penyandang disabilitas dipandang bukan sebagai kelompok yang “kekurangan” namun sebagai hasil bentukan dari konstruksi sosial dan politik sehingga hak asasi dari masyarakat penyandang disabilitas menjadi tidak terpenuhi (Millati, 2016).

Kondisi ini disinyalir sebagai rendahnya pemahaman atas *disability awareness* yang selama ini masih dipandang sebagai literasi yang hanya dibutuhkan bagi beberapa golongan saja. Pada dasarnya *disability awareness* tidak hanya menjadi monopoli kebutuhan beberapa orang saja. Rendahnya *awareness* publik atas isu disabilitas maka akan berimplikasi juga pada perilaku diskriminatif yang diterima oleh penyandang disabilitas (Widinarsih, 2019). Dengan demikian dapat disimpulkan, semakin rendahnya *disability awareness* yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin tinggi pula peluang munculnya sikap diskriminasi pada penyandang disabilitas. Kondisi ini yang akhirnya dipandang perlu karena dengan semakin terbukanya pemahaman atas *disability awareness* maka juga akan mengembangkan pemahaman dalam komunikasi inklusif. Menerapkan komunikasi inklusif dengan kata lain menerapkan pula etika dan tata krama dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas serta menegakkan prinsip “*leaving no one behind*” sebagai komponen kunci dalam agenda Sustainable Development 2030 (WHO, 2020).

Tujuan utama dalam pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan dan meningkatkan skill komunikasi inklusif kepada para kader Posyandu. Dengan tujuan ini, desain pemecahan masalah yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang *disability awareness* dan etika komunikasi kepada penyandang disabilitas. Kegiatan ini memberikan pengetahuan tentang *disability awareness* kepada kader Posyandu mulai dari pengetahuan tentang beragam disabilitas hingga pengenalan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing disabilitas. Setelah itu, kader Posyandu mendapatkan pengetahuan terkait etika komunikasi kepada penyandang disabilitas yang tepat, sehingga dengan pengetahuan ini akan mendukung penerapan komunikasi inklusif kepada penyandang disabilitas.
2. *Role play* sebagai penyandang disabilitas dan pendampingan yang dilakukan oleh kader Posyandu. Kegiatan ini melibatkan 2 orang peserta dengan pembagian perannya adalah 1 orang berperan sebagai penyandang disabilitas dan 1 orang lagi berperan sebagai pendamping. Aktivitas *role play* ini menjadi kegiatan penerapan hasil dari sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya.

| 69

Dalam pandangan Komunikasi untuk Perubahan Sosial dan Perilaku (*Communication for Social and Behavioral Change*) perubahan dalam masyarakat merupakan sebuah proses berbasis bukti dan partisipatif yang memfasilitasi keterlibatan anak-anak, keluarga, komunitas, masyarakat dan pengambil keputusan untuk perubahan sosial dan perilaku yang positif baik dalam konteks pembangunan maupun kemanusiaan melalui perpaduan platform dan alat komunikasi yang tersedia (UNICEF, 2020). Dari sini dapat dilihat bahwa upaya perubahan sosial dan perilaku yang ada pada masyarakat menjadi sebuah proses yang sifatnya partisipatif. Sehingga, melibatkan kader Posyandu dalam menciptakan inisiasi perubahan atas perilaku terhadap penyandang disabilitas menjadi penting. Terlebih dengan peran para kader Posyandu sebagai penggerak dan penyuluh masyarakat, sehingga harapannya masyarakat menjadi lebih mudah memahami dan memacu munculnya perubahan pada masyarakat atas pandangan terhadap cara berkomunikasi yang inklusif kepada penyandang disabilitas.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Pemberian materi sosialisasi tentang *disability awareness* dan etika komunikasi dengan penyandang disabilitas:

Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dasar kepada kader Posyandu tentang jenis disabilitas yang telah tertuang dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Peserta juga dikenalkan dengan penyebutan istilah yang lebih tepat digunakan untuk saat ini dalam penyebutan penyandang disabilitas. Peserta juga diperkenalkan jenis hambatan yang dimiliki oleh masing-masing jenis disabilitas. Selanjutnya, peserta diajarkan tentang etika komunikasi dengan penyandang disabilitas.

Etika komunikasi dengan penyandang disabilitas menjadi kunci dasar yang dapat dikembangkan oleh kader Posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. *Role play* komunikasi inklusif kepada penyandang disabilitas:

Kegiatan ini membagi kader Posyandu ke dalam 2 peran secara berpasangan. Masing-masing pasangan 1 orang memerankan sebagai penyandang disabilitas dan 1 orang lagi memerankan sebagai pendamping. Dalam *role play* tersebut, pemeran penyandang disabilitas bertindak sebagai pengguna layanan Posyandu yaitu mengecek kondisi kesehatannya. Sedangkan pemeran yang lain bertindak sebagai kader Posyandu yang menawarkan pendampingan kepada penyandang disabilitas. Pendamping dari kader Posyandu bertugas menawarkan bantuan kepada penyandang disabilitas untuk melakukan mobilisasi dari lokasi tempat parkir sepeda motor menuju ke dalam tempat Posyandu. Kader Posyandu diwajibkan menggunakan kalimat tawaran yang baik kepada penyandang disabilitas dan menghormati kebutuhan penyandang disabilitas.

| 70

3. Pemberian pretest dan postest sebagai bentuk asesmen sederhana:

Prestest dan postest yang diberikan kepada kader Posyandu digunakan untuk mengukur pemahaman kader Posyandu atas *disability awareness*, etika komunikasi penyandang disabilitas dan juga kegiatan praktek *role play* yang dilakukan oleh kader Posyandu. Hasil pretest digunakan untuk mengukur pengetahuan yang dimiliki oleh kader Posyandu tentang disabilitas sebelum mendapatkan sosialisasi dan *role play*. Hasil postest digunakan untuk mengukur pengetahuan yang dimiliki oleh kader Posyandu tentang disabilitas setelah mendapatkan sosialisasi dan melakukan *role play*.

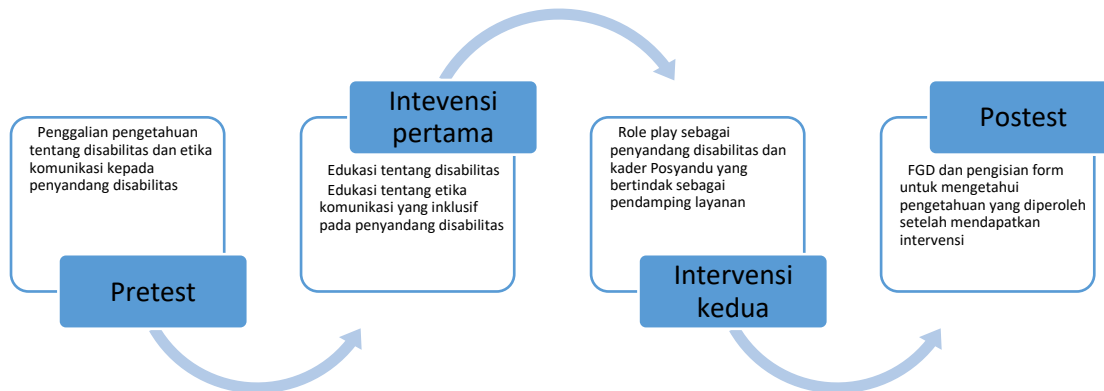
Penyusunan asesmen didasarkan pada tujuan dari pemberian pengetahuan *disability awareness* dan etika komunikasi kepada penyandang disabilitas yaitu memahami tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas, membantu menghilangkan sikap negatif terhadap individu penyandang disabilitas, dan menghilangkan keyakinan negatif yang menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas (A. D. Santoso, 2019). Adapun indikator yang disusun ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan penggunaan istilah yang tepat dalam penyebutan kondisi disabilitas.
2. Etika berkomunikasi kepada penyandang disabilitas.
3. Pengetahuan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Hasil Kegiatan dan Pembahasan

Program pengabdian masyarakat yang ditujukan bagi kader Posyandu menjadi salah satu upaya pengenalan awal atas pengetahuan tentang disabilitas dan cara berkomunikasi secara inklusif yang tepat. Dalam program pengabdian masyarakat ini, fokus utama komunikasi inklusif hanya ditujukan pada komunikasi yang tepat kepada penyandang disabilitas, bukan pada bentuk inklusivitas lain yang berbasis identitas seksual. Dengan demikian, penekanan komunikasi inklusif

ini adalah untuk etika komunikasi yang tepat kepada penyandang disabilitas. Secara umum, proses intervensi yang dilakukan dapat dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 1. Bagan proses intervensi kader Posyandu

Merujuk pada paparan yang telah disampaikan sebelumnya, upaya penambahan skill komunikasi inklusif kepada kader Posyandu didasarkan pada pemetaan permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun permasalahan yang muncul pada kader Posyandu terkait komunikasi inklusif berdasarkan data dari hasil pretest adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pemetaan Permasalahan Pemahaman Komunikasi Inklusif Kader Posyandu

Indikator	Permasalahan
Pengetahuan penggunaan istilah yang tepat dalam penyebutan kondisi disabilitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih menggunakan istilah cacat tubuh 2. Tidak mengetahui pergeseran makna dari cacat tubuh menjadi disabilitas 3. Tidak mengetahui munculnya pergeseran makna istilah "tuna" pada penyebutan beberapa jenis disabilitas 4. Menilai kasar penggunaan istilah seperti Tuli sebagai pengganti istilah tunarungu
Etika berkomunikasi kepada penyandang disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memandang semua jenis disabilitas pasti membutuhkan bantuan 2. Menawarkan bantuan terlebih dahulu dinilai tidak peka dengan kondisi penyandang disabilitas 3. Jika ingin membantu, maka bisa langsung membantu tanpa harus menawarkan bantuan terlebih dahulu
Pengetahuan alat bantu bagi penyandang disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami fungsi alat bantu bagi penyandang disabilitas 2. Memandang alat bantu bagi penyandang disabilitas bukan sebagai alat aksesibilitas <i>one for all</i>

Merujuk pada tabel 1, ditemukan bahwa kader Posyandu masih belum mengetahui penggunaan istilah penyandang disabilitas sebagai penyebutan yang tepat, meskipun ada yang memahami tentang istilah penyandang disabilitas tapi kecenderungannya sudah terbiasa menggunakan istilah cacat tubuh. Selain itu, ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas saat di Posyandu, cenderung langsung memberikan bantuan karena memandang penyandang disabilitas sebagai sosok yang tidak berdaya. Justru upaya menanyakan dan menawarkan bantuan terlebih dahulu dipandang menjadi tidak peka terhadap kondisi penyandang disabilitas. Namun di sisi lain, kader Posyandu telah memahami manfaat dari alat bantu berupa bentuk bangunan dengan aksesibilitas yang digunakan oleh penyandang disabilitas walaupun mereka masih berpandangan aksesibilitas bangunan hanya digunakan untuk penyandang disabilitas. Dengan kata lain, prinsip *one for all* pada aksesibilitas bangunan masih belum dipahami oleh kader Posyandu.

| 72

Dari permasalahan yang ditemukan pada saat pretest tersebut, pemberian intervensi berupa pemberian pengetahuan tentang disabilitas dan etika komunikasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas menjadi perlakuan pertama yang diberikan. Dalam pemberian materi tersebut, pemetaan topik yang diberikan didasarkan pada indikator yang telah ditetapkan pada asesmen. Berikut adalah pemetaan topik sebagai bentuk intervensi pertama yang diberikan:

Tabel 2. Indikator dan Topik pada Intervensi Pertama

Indikator	Topik
Pengetahuan penggunaan istilah yang tepat dalam penyebutan kondisi disabilitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan istilah penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 menggantikan istilah cacat tubuh pada Undang-Undang No. 4 tahun 1997 2. Penjelasan ragam jenis disabilitas berikut dengan hambatan yang dihadapi 3. Pengenalan penyebutan jenis disabilitas yang disusun oleh komunitas disabilitas
Etika berkomunikasi kepada penyandang disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cara membangun komunikasi di awal pertemuan dengan penyandang disabilitas 2. Upaya membaca kondisi penyandang disabilitas 3. Penggunaan kata-kata yang tepat saat akan menawarkan bantuan kepada penyandang disabilitas
Pengetahuan alat bantu bagi penyandang disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membedakan aksesibilitas dan akomodasi 2. Mengenalkan jenis aksesibilitas dan akomodasi

Berdasarkan proses intervensi pertama yang dilakukan, kader Posyandu melakukan *role play* sebagai intervensi kedua yang digunakan sebagai bentuk praktek sederhana setelah mendapatkan pengetahuan dasar. Aktivitas *role play* ini ditujukan agar kader Posyandu dapat merasakan perbedaan antara cara berkomunikasi yang sebelumnya dilakukan kepada penyandang disabilitas dengan cara komunikasi inklusif yang telah dipelajari dari intervensi pertama. Hasil aktivitas *role play* yang dilakukan menunjukkan bahwa kader Posyandu

ditemukan bahwa tidak perlu takut untuk menanyakan kebutuhan aksesibilitas atau akomodasi yang dibutuhkan oleh masing-masing penyandang disabilitas karena jika hanya berdasarkan belas kasihan atau iba ternyata malah membuat penyandang disabilitas bisa jadi merasa tidak nyaman. Di sisi lain, keterlibatan kader Posyandu dalam *role play* ini akhirnya mampu memancing kreativitas mereka untuk membuat kalimat yang lebih tepat digunakan ketika berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Pada satu sisi menambah pengetahuan mereka dalam komunikasi inklusif serta di sisi lain yang dapat ditemukan adalah menambah skill mereka untuk berkomunikasi secara inklusif kepada penyandang disabilitas.

| 73

Aktivitas *role play* ternyata mampu membuat kader Posyandu memahami pengetahuan tentang disabilitas dan komunikasi inklusif kepada penyandang disabilitas. Hal ini tampak dari pemahaman mereka pada saat melakukan posttest. Dari ketiga indikator yang digunakan untuk melakukan asesmen sederhana, baik melalui pengisian formulir maupun dari proses FGD, diketahui bahwa kader Posyandu mulai beradaptasi dengan pengetahuan baru yang mereka miliki. Walaupun mereka sendiri juga mengakui bahwa pengetahuan yang dimiliki masih belum banyak, namun mereka merasakan bahwa dengan komunikasi inklusif membuat tidak hanya penyandang disabilitas saja yang nyaman, namun juga membuat kader Posyandu merasakan nyaman dan tidak cemas untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.



Gambar 2. Proses pengisian formulir posttest sebagai asesmen sederhana

Kondisi *communication apprehension* atau kecemasan dalam berkomunikasi yang dialami oleh kader Posyandu sebelum mendapatkan intervensi dan sesudah mendapatkan intervensi menunjukkan bahwa ada kecemasan yang sebelumnya dirasakan karena takut menyinggung perasaan penyandang disabilitas saat berkomunikasi. Rasa takut atau *fear* yang dirasakan oleh kader Posyandu menjadi sesuatu yang lumrah dirasakan karena takut menyinggung perasaan penyandang disabilitas selain itu juga mereka merasa tidak cukup memiliki skill yang baik dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas (DeVito, h. 217, 2023). Kondisi ini menjadi berkurang setelah mendapatkan intervensi terutama saat melakukan *role play* karena dengan demikian mereka dapat merasakan sendiri mana pesan yang tepat dan tidak tepat saat mereka diposisikan sebagai penyandang disabilitas.

Aktivitas intervensi yang dilakukan menjadi salah satu upaya dasar yang dapat dilakukan untuk mengenalkan tentang pengetahuan atas disabilitas dan termasuk etika komunikasi inklusif. Dalam studi yang dilakukan sebelumnya oleh Ison et.al (2010) menunjukkan bahwa pengenalan *disability awareness* merupakan bentuk program yang mampu mengintervensi

pengetahuan tentang disabilitas. Lebih lanjut lagi, dengan peningkatan pengetahuan atas *disability awareness* mampu meningkatkan potensi inklusi sosial dengan melibatkan penyandang disabilitas menjadi lebih baik lagi (Ison et al., 2010). Bahkan dengan desain yang dimulai dari penanaman *disability awareness* di usia anak-anak dan remaja bahkan mampu memberikan perubahan terhadap sikap negatif yang selama ini diterima penyandang disabilitas (Chae et al., 2019; Lindsay & Edwards, 2013; Tavares, 2011).

Maka, merujuk dari hasil yang telah dilakukan melalui proses intervensi tersebut, peluang meningkatnya pemahaman atas *disability awareness* dan komunikasi inklusif kepada penyandang disabilitas dapat menjadi lebih baik lagi. Jika proses yang dilakukan saat ini adalah memberikan intervensi kepada kader Posyandu yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan, maka akan membuka peluang yang sama untuk memberikan intervensi pada *opinion leader* lain sehingga dapat semakin membuka pengetahuan atas disabilitas. Dengan demikian, semakin meningkatnya pemahaman atas komunikasi inklusif menjadi jalan pembuka pula pada terciptanya kondisi inklusi sosial yang lebih baik lagi.

Simpulan dan Saran

Aktivitas intervensi kepada kader Posyandu memberikan peluang baru bahwa pengetahuan komunikasi inklusif berikut dengan penerapannya menjadi skill yang harus dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat. Kondisi ini bukan lagi sesuatu yang utopis, karena pada dasarnya skill ini dapat dipelajari dan dipahami oleh setiap kalangan. Meskipun masih jauh dari gambaran ideal tentang komunikasi inklusif dalam lingkungan yang semakin baik pula inklusi sosialnya, namun ini menunjukkan bahwa dengan proses intervensi yang sederhana dan dengan didasarkan pada asesmen pengetahuan mandiri dapat memunculkan peluang pula untuk melakukan intervensi pada jenis kelompok masyarakat yang berbeda.

Upaya intervensi selanjutnya diharapkan menysasar pada kelompok lain yang merupakan pihak pengambil keputusan. Dengan melakukan intervensi kepada pihak pengambil keputusan, maka diharapkan penyusunan kebijakan akan jauh lebih mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, intervensi juga dapat mulai dilakukan pada usia anak-anak hingga remaja yang umumnya di Indonesia masih belum dipandang menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh FISIP Universitas Brawijaya yang memberikan peluang dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Selain itu, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Subdirektorat Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya yang menjadi tempat Penulis untuk mendiskusikan upaya intervensi dalam kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- Chae, S., Park, E. Y., & Shin, M. (2019). School-based Interventions for Improving Disability Awareness and Attitudes Towards Disability of Students Without Disabilities: A Meta-analysis. *International Journal of Disability, Development and Education*, 66(4), 343–361. <https://doi.org/10.1080/1034912X.2018.1439572>
- DeVito, J.A. (2023). *The Interpersonal Communication Book* (16th edition). New York: Pearson
- Ison, N., McIntyre, S., Rothery, S., Smithers-Sheedy, H., Goldsmith, S., Parsonage, S., & Foy, L. (2010). “Just like you”: A disability awareness programme for children that enhanced knowledge, attitudes and acceptance: Pilot study findings. *Developmental Neurorehabilitation*, 13(5), 360–368. <https://doi.org/10.3109/17518423.2010.496764>
- Iswahyudi, F., & Firdaus, F. (2010). Aksesibilitas dalam Pelayanan Publik untuk Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus. *Jurnal Borneo Administrator*, 6(3), 9–10.
- Lindsay, S., & Edwards, A. (2013). A systematic review of disability awareness interventions for children and youth. *Disability and Rehabilitation*, 35(8), 623–646. <https://doi.org/10.3109/09638288.2012.702850>
- Millati, S. (2016). Social Relational Model dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, 3(2), 285–304. <https://doi.org/10.14421/ijds.030207>
- Santoso, A. D. (2019). Social media campaigns on disability awareness: A content analysis of official government Twitter accounts. *Life Span and Disability*, 22(1), 95–112.
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>
- Tavares, W. (2011). An evaluation of the kids are kids disability awareness program: Increasing social inclusion among children with physical disabilities. *Journal of Social Work in Disability and Rehabilitation*, 10(1), 25–35. <https://doi.org/10.1080/1536710X.2011.546296>
- UNICEF. (2020). *Social and Behavioural Change Interventions to Strengthen Disability-Inclusive Programming*.
- WHO. (2020). *Disability- Inclusive. HEALTH SERVICES TOOLKIT A Resource for Health Facilities in the Western Pacific Region*. 134. <https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14639/9789290618928-eng.pdf>
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 127–142.